



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

| | |
|-------------|---|
| Judul | : Dikaji oleh Wamenag dan Menpan: tentang urgensi pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren |
| Tanggal | : Senin, 20 Oktober 2025 |
| Surat Kabar | : Rakyat Merdeka |
| Halaman | : 2 |

Dikaji Oleh Wamenag Dan Menpan RB

Tentang Urgensi Pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren

DIREKTORAT Jenderal (Dirjen) Pesantren di Kementerian Agama akan segera berdiri. Kabar tersebut datang dari Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syaifi. Wacana pembentukan Ditjen Pesantren ini langsung mendapat beragam respons. Antara lain dari anggota DPR dan akademisi.

Kabar itu disampaikan Romo Syaifi usai bertemu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini. Dia mengatakan bahwa surat permohtoran izin prakarsa sertera ditulis ke Sekretariat Negara. "Alhasil surat ada ketika Surat permohtoran ini prakarsa pembentukan Ditjen Pesantren ditandatangani hari ini, untuk dikirim ke Sekretariat Negara," ujar Romo Syaifi, Jumat (17/10/2025).

Dia pun mengapresiasi yang dilakukan Kemenpan RB dalam proses pengusulan pembentukan Ditjen Pesantren. Pasalnya, usul ini

sedang berproses sejak 2019, lalu diusulkan kembali pada 2021-2023, dan 2024. "Alhamdulillah, di era Menpan Ibu Rini, ada progres signifikan. Kita sangat apresiasi," ujar ujarnya.

Menurutnya, pembentukan Ditjen Pesantren mendesak karena pesantren mengembangkan manfaat undang-undang yang sangat berat. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren, yang mengatur fungsi pesantren, yaitu pendidikan, dakwah, dan pembentukan masyarakat.

"Kelebihan yang di bahan sudah diperlukan banyak pesantren, sejak sebelum Indonesia mendeklarasikan diri sebagai negara Islam," papar Romo Syaifi.

Dia menjelaskan, fungsi pendidikan yang diemban pesantren, menurut dia, terus berkembang, dari tingkat dasar sampai pengurusan tinggi (ma'had aly). Menurut dia, lembaga pendidikan keagamaan

Islam Khas Indonesia ini menjadi kawah bagi para jatahan santri dalam mendalami ajaran Islam rahmatan illi 'alain.

Wamenag pun optimistis, Direktorat Jenderal (Dirjen) Pesantren secara terbukti. Pembentukan Ditjen tersebut diharapkan jadi kado Hari Santri pada 22 Oktober 2025. "Saya optimistis Hari Santri pada 2025 akan izin prakarsa pembentukan Ditjen Pesantren dari Presiden Prabowo," ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq menilai pembentukan Ditjen Pesantren merupakan lahirnya strategis. Dirjen Pesantren bagi dunia pesantren di Indonesia. Dia melihat, keputusan ini bukan sekadar perbaikan struktural di Kementerian Agama, melainkan perbaikan pengakuan negara terhadap jasa dan kontribusi pesantren dalam membangun bangsa.

"Pesantren selama ini menjadi pilar penting dalam membangun karakter bangsa, mencetak ulama, dan menjaga nilai-nilai kebangsaan," ujar Maman

dan menjaga nilai-nilai kebangsaan," ujar Maman kepada Rakyat Merdeka, Jumat (18/10/2025).

Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Ahmad Tholabi Kharlie memandang, langkah wacana pembentukan Ditjen Pesantren ini sebagai kebutuhan yang sangat penting dan mendesak. Dia menambahkan, pembentukan ini guna menjamin keberlanjutan kebijakan afirmatif bagi pesantren di masa mendatang.

"Ini bukan semata urusan administratif, tapi ini merupakan upaya penataan kelembagaan agar negara hadir sejara dalam mengelola dan mengawasi kelembagaan pilar perwujudan Islam Nasional," ujar Tholabi saat dihubungi Rakyat Merdeka, Sabtu (19/10/2025).

Untuk mengetahui lebih jauh pandangan Maman Imanulhaq dan Ahmad Tholabi Kharlie tentang pembentukan Ditjen Pesantren, berikut wawancaranya.

MAMAN IMANULHAQ
Anggota Komisi VIII DPR

Banyak Kebijakan Yang Tumpang Tindih

“

Selama ini, pengelolaan pesantren cenderung tersebar di berbagai direktorat dan program yang belum terintegrasi. Banyak kebijakan tumpang tindih.



PROF AHMAD THOLABI KHLARIE
Wakil Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Momentum Upaya Penataan Kelembagaan

“

Ditjen Pesantren dapat berfungsi sebagai katalis, yang mempercepat integrasi antara tradisi keilmuan klasik dan inovasi kontemporer.



APA pandangan Anda terhadap wacana pembentukan Ditjen Pesantren di tubuh Kementerian Agama?

Apakah ditjen Pesantren merupakan langkah strategis dan berorientasi pada tujuan dan peran pesantren, perlu dibentuk direktorat khusus?

Selama ini, pengelolaan pesantren cenderung tersebar di berbagai direktorat dan program yang belum terintegrasi. Banyak kebijakan tumpang tindih, dan belum ada standar yang jelas.

Saya optimistis bisa. Ditjen Pesantren akan menjadi ruang koordinasi yang lebih kuat untuk menavigasi program pengembangan pesantren, baik ekonomi, dan pengurusan karakter santri. Dengan kebijakan yang fokus, Pemerintah dapat memfasilitasi pesantren bertransformasi menjadi lembaga yang adaptif, tumbuh berkarir pada mitra-mitra kelembagaan dan kebutuhan.

Menurut Anda, langkah ini bisa menjawab tantangan besar yang dihadapi pesantren ini?

Saya optimistis bisa. Ditjen Pesantren akan menjadi ruang koordinasi yang lebih kuat untuk menavigasi program pengembangan pesantren, baik ekonomi, dan pengurusan karakter santri. Dengan kebijakan yang fokus, Pemerintah dapat memfasilitasi pesantren bertransformasi menjadi lembaga yang adaptif, tumbuh berkarir pada mitra-mitra kelembagaan dan kebutuhan.

Menurut Anda, apa dampak positif dari Ditjen Pesantren ini?

Penting untuk menghadirkan satuan komando kebijakan yang lebih fokus dan terarah. Munculnya kebijakan yang lebih sering kali parsial.

APA pandangan Anda terkait wacana pembentukan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pesantren di Kementerian Agama?

Pembentukan Ditjen Pesantren merupakan langkah strategis dalam rangka penataan kelembagaan dan pengembangan pesantren.

Perlu dicatat bahwa pembentukan Ditjen Pesantren adalah entitas pendidikan tertua di Indonesia yang memiliki fungsi ganda.

Yakni sebagai lembaga *sofogahifid* atau pesantren ilmiah agama dan sebagai lembaga pendidikan.

Kedua, kemandirian ekonomi pesantren bisa diperlukan lewat fasilitasi akses penanaman, intikhusus warasaha santri, dan pengurusan pekerjaan industri halal.

Bagaimana pesantren melakukan hal tersebut selama ini?

Banyak pesantren yang telah bergerak menuju integrasi dan koordinasi dalam mendapatkan dukungan kebijakan yang proporsional.

Ditjen Pesantren dapat berfungsi sebagai katalis, yang mempercepat integrasi antara tradisi keilmuan klasik dan inovasi kontemporer.

Sehingga pesantren tidak hanya

kuat dalam spiritualitas, tetapi juga berdaya secara sosial dan ekonomi.

Apakah ini tidak akan menambah beban birokrasi bagi Kemenag?

Bisa saja, tetapi dengan desain yang cermat, kelembagaan yang efisien dan berbasis kebutuhan lapangan. Yang penting bukan sekadar menambah struktur, tetapi memerlukan ulang orientasi birokrasi agar lebih fungsional dan efektif.

Jumat (17/10/2025) yang diluncurkan adalah tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Ditjen Pesantren hadir sebagai regulator yang memerlukan bukan membatasi.

Arinya, Ditjen harus berperan memfasilitasi dan memfasilitasi, dan mengontrol secara berimbang. Jika pendekatan yang digunakan adalah *empowering governance*, bukan *bureaucratic control*, maka Ditjen Pesantren akan menjadi jembatan kemanfaatan, bukan beban tambahan. ■ KHM